

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM POS PEMBINAAN
TERPADU PENYAKIT TIDAK MENULAR (POSBINDU PTM)
DI DESA MAKKAWING KECAMATAN BALAI
KABUPATEN SANGGAU**

Oleh :

JULIANAWATI^{1*}

NIM : E1011171068

Dedi Kusnadi^{2*}, Indah Sulisdiani.^{2*}

Email : julianawati.untan.ac.id@student.untan.ac.id

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses implementasi Kebijakan Program Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM) Di Desa Makkawing Kecamatan Balai Kabupaten Sanggau, program ini merupakan salah satu program yang bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penemuan faktor resiko PTM. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Peneliti menggunakan teori implementasi dari O. Jones (dalam Tahir 2011:122) yang di maksudkan untuk mengoprasikan sebuah program dengan memperhatikan tiga aktivitas utama kegiatan yaitu 1) Organisasi; 2) Interpretasi; 3) Aplikasi. Hasil penelitian diketahui bahwa dalam implementasi program Posbindu PTM di Desa Makkawing adapun kondisi setelah implementasi berdasarkan aktivitas isi kebijakan, yaitu 1) pada aktivitas organisasi sumber daya manusia sudah baik dalam segi pendidikan dan jumlah, namun sumber daya anggaran dan sarana prasaran masih kurang; 2) Pada aktivitas Interpretasi terhadap program Posbindu belum optimal disebabkan alat-alat untuk mengecek kesehatan masih kurang, masyarakat kurang dalam pemahaman tentang Posbindu PTM padahal para kader sudah memahami dengan baik hanya saja para kader kurang mengsosialisasikan kegiatan Posbindu ini; 3) pada aktivitas Aplikasi sudah cukup baik para kader sudah melakukan pelayanan yang baik sesuai pedoman pelaksanaan serta pelayanan sudah lima meja dan sesuai dengan fungsinya masing-masing namun masyarakat yang datang sedikit. Saran terkait penelitian ini adalah pihak Pihak Puskesmas serta pelaksana program posbindu berkordinasi dengan masyarakat, menambah alat-alat yang dibutuhkan serta menambah anggaran program ini

Kata Kunci: Implementasi, Pelayanan, Program Posbindu, Penyakit Tidak Menular

IMPLEMENTATION OF THE INTEGRATED DEVELOPMENT POST FOR NON-COMMUNICABLE DISEASES (POSBINDU PTM) POLICY PROGRAM IN MAKKAWING VILLAGE, BALAI SUB-DISTRICT, SANGGAU REGENCY

by

JULIANAWATI*

Student Number : E1011171068

Dedi Kusnadi^{2*}, Indah Sulisdiani^{2*}

Email : julianawati.untan.ac.id@student.untan.ac.id

1. Student of Public Administration Study Program at the Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University, Pontianak,
2. Lecturer of Public Administration Study Program at the Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University, Pontianak.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation process of the Integrated Development Post for Non-Communicable Diseases (Posbindu PTM) Program in Makkawing Village, Balai Sub-District, Sanggau Regency. This program is one programs that aims to increase community participation in the prevention and discovery of Non-Communicable Disease risk factors. This study used a descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques were data reduction, data display and conclusion drawing. This research used the implementation theory by O. Jones (in Tahir 2011:122) which is intended to operate a program by taking into account three main activities, namely 1) Organization; 2) Interpretation; 3) Application. The results showed that in the implementation of the Posbindu PTM program in Makkawing Village, the conditions after implementation were based on policy content activities, namely 1) the activities of human resource organization were good in terms of education and quantity, but budget resources and infrastructure were still inadequate; 2) The activities of interpretation for the Posbindu program has not been optimal due to the lack of equipment for health examination; the community lacks an understanding of the Posbindu PTM even though the cadres already understand it well, but they do not socialize the Posbindu activities; 3) the activities of application is quite good; the cadres have done good service in line with the implementation guidelines and the service has five counters and in accordance with their respective functions, but few people come. Recommendations from this research are among others, that the Community health Center (Puskesmas) and Posbindu program implementers should coordinate with the community, add the required equipment and increase the budget for this program.

Keywords: Implementation, Services, Integrated Development Post (Posbindu) Program, Non-Communicable Diseases

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pengendalian penyakit di Indonesia saat ini mengalami perubahan. Hal tersebut dikarenakan adanya peningkatan penyakit yang tidak menular, di samping penyakit menular yang juga masih menjadi masalah. ditambah lagi dengan adanya pandemi Covid-19 sehingga semakin menyulitkan. "Berdasarkan data dari WHO, 66% penyebab kematian di Indonesia adalah penyakit tidak menular. "Angka ini terdiri dari penyakit-penyakit kardiovaskuler penyakit kanker dan diabetes dan penyakit-penyakit tidak menular, Selain itu, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat terlarang, serta merokok juga menjadi masalah tersendiri yang menimbulkan kecenderungan kejadian penyakit tidak menular semakin meningkat. Permasalahan tersebut merupakan salah satu hal yang diketahui dari hasil sensus penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Penyakit tidak menular yang disingkat PTM adalah penyakit yang tidak bisa di tularkan dari orang ke orang yang perkembangannya berjalan perlahan dalam jangka waktu yang panjang (kronis). penanggulangan PTM adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek

promotif dan preventif tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif serta paliatif yang ditujukan untuk menurunkan angka kesakitan, Kecacatan, dan kematian yang dilaksanakan secara komprehensif, efektif, efisien dan berkelanjutan.

Penanganan PTM di Indonesia, salah satu bentuk dari pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat adalah dengan di bentuknya Pos Binaan Terpadu (Posbindu), Posbinaan Terpadu adalah kegiatan monitoring dan deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular. Tujuan utama Posbindu PTM adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penemuan dini faktor resiko PTM. Oleh karena itu sasaran Posbindu PTM cukup luas mencakup semua masyarakat usia 15 tahun ke atas baik itu kondisi sehat, masyarakat beresiko maupun masyarakat dengan kasus PTM. Posbindu PTM bertujuan untuk mengontrol dan menjaga Kesehatan secara optimal baik dengan upaya preventif seperti penyuluhan dan kuratif melalui sistem rujukan Posbindu PTM ke Puskesmas. Oleh karena itu, dengan adanya PTM Posbindu, kesehatan masyarakat di desa akan lebih terkontrol, terutama bagi masyarakat yang belum mengenal kesehatan dan yang jauh dari Puskesmas. Adanya Posbindu mengharuskan orang

menjalani pemeriksaan kesehatan yaitu satu kali dalam sebulan untuk mengurangi risiko PTM di masyarakat. Keberadaan Posbindu diharapkan dapat mengatasi berbagai penyakit tidak menular, seperti kolesterol, diabetes, stroke, kanker dan sebagainya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit tidak menular dalam pelaksana program Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular ini membutuhkan kerjasama yaitu kepemimpinan, koordinasi, dan keterlibatan dari berbagai pihak dan juga dukungan dari berbagai sector terutama peran serta masyarakat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2015 pasal 20 dijelaskan peran serta masyarakat ialah:

1. Masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok berperan aktif dalam penanggulangan PTM.
2. Peran serta masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UMKB) dengan membentuk dan mengembangkan Pos Pembinaan Terpadu PTM (Posbindu PTM)
3. Pada Pos Pembinaan Terpadu PTM (Posbindu PTM) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan kegiatan deteksi dini, monitoring dan tindak lanjut dini factor risiko PTM secara mandiri dan

berkesinambungan di bawah pembinaan Puskesmas.

Kementerian Kesehatan juga menyusun pedoman umum dan teknis Posbindu PTM. Merujuk pada pedoman tersebut agar pemberdayaan Posbindu PTM dapat dilakukan secara efektif, dan dapat berperan sesuai dengan kewenangan dan tugas pokok masing-masing diperlukan petunjuk operasional sebagai pengelola program Posbindu PTM dalam upaya meningkatkan deteksi dini, mencegah, dan mengendalikan penyakit tidak menular.

Pedoman umum dan Proses kegiatan Posbindu PTM dalam tahapan layanan 5 meja meliputi:

1. Registrasi, pemberian nomor urut dan pencatatan ulang hasil pengisian KMS ke buku pencatatan/register oleh petugas pelaksana Posbindu PTM;
2. Wawancara untuk menelusuri informasi faktor risiko perilaku dan riwayat PTM pada keluarga dan sasaran kegiatan;
3. Pengukuran (tinggi badan, berat badan dan lingkar perut);
4. Pemeriksaan faktor risiko PTM (tekanan darah, gula darah, kolesterol total, trigliserida, pemeriksaan APE, CBE, IVA dan lain sebagainya disesuaikan dengan kemampuan Posbindu PTM) dan
5. Identifikasi faktor risiko PTM, konseling/edukasi dan tindak lanjut lainnya (misal: rujuk ke Puskesmas)

Selain itu dilakukan pencatatan dan pelaporan sehingga pelaksanaannya lebih tertata dan terarah. Data hasil pencatatan dan pelaporan dikembangkan menjadi informasi melalui kegiatan surveilans

faktor risiko PTM berbasis Posbindu PTM. Pemerintah daerah telah menetapkan programnya masing-masing, sama halnya dengan pemerintah Kabupaten Sanggau. Dengan adanya program Posbindu PTM, pemerintah berharap akan berkurangnya penyakit tidak menular yang ada di Kabupaten Sanggau. Pemerintah daerah Kabupaten Sanggau melalui Dinas Kesehatan dan dilaksanakan oleh puskesmas menghimbau untuk mengurangi angka persentasenya mengajak masyarakat Kabupaten Sanggau untuk bergerak aktif dan sadar mengenai tingkat Kesehatan tersebut. Salah satu Puskesmas yang telah melaksanakan Program Posbindu PTM ialah Puskesmas Batang Tarang dan berkerjasama dengan pihak Desa untuk melaksanakan program Posbindu PTM, di Puskesmas Batang Tarang terdiri dari 12 Posbindu PTM yang berada di setiap desa, salah satunya di Desa Makkawing.

Program Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular yang dilaksanakan di Desa makkawing sudah berjalan sejak 2019 lalu, program ini dilaksanakan dan dijalankan di Desa Makkawing mengingat kesadaran masyarakat yang kurang dalam hal Kesehatan serta untuk mendukung

program yang dilaksanakan oleh Puskesmas Batang Tarang, dengan dilaksanakan program Posbindu PTM di Desa Makkawing akan lebih terkontrol kesehatan masyarakat, dan masyarakat diharapkan datang untuk memeriksa Kesehatannya yaitu sebulan sekali di Desa Makkawing yang dilakukan setiap tanggal 7 (tujuh). Keberadaan Posbindu PTM ini untuk mengontrol dan menjaga Kesehatan secara optimal baik dengan upaya preventif seperti penyuluhan dan kuratif melalui sistem rujukan ke Puskesmas sasaran program Posbindu yang dilakukan di Desa makkawing ialah masyarakat yang berusia 15 tahun ke atas.

Pelaksana Program Posbindu PTM di Desa Makkawing dilaksanakan oleh tenaga Kesehatan yang berada di Desa dan melibatkan masyarakat Desa yang disebut Kader Posbindu jumlahnya ada 5 orang yang terdiri dari 2 bidan dan 3 masyarakat Desa Makkawing, dengan adanya kader-kader dalam melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, pelayanan berupa wawancara terarah melalui instrument atau fomulir untuk mengidentifikasi Riwayat penyakit tidak menular dalam keluarga yang telah diderita, pengukuran berat badan, tinggi badan, lingkaran perut, pemeriksaan tekanan darah, kolestrol, asam urat, serta konseling.

Program Posbindu PTM sudah berjalan selama 2 tahun ini di Desa Makkwing tetapi masih banyak masyarakat yang tidak tahu apa itu Posbindu PTM, para pelaksana atau kader-kader Program Posbindu PTM kurang melakukan sosialisasi yang dimana kader-kader Posbindu PTM hanya memberi tahu jika program Posbindu PTM ini dilaksanakan di Desa Makkawing melalui orang ke orang tanpa adanya sebuah sosialisasi formal, pemberitahuan dari orang ke orang, seperti melalui seorang kader yang berasal dari salah satu dusun untuk menyampai kan nya kepada masyarakat sekitar tempat tinggalnya, tetapi hanya beberapa masyarakat saja yang paham dan mau pergi ke Posbindu PTM ini, sedangkan masyarakat yang berada diluar Dusun tersebut hanya tahu saja tetapi tidak mengerti tentang Program Posbindu PTM seperti apa karena mereka tidak mendapatkan pemahaman dari kader-kader Posbindu PTM secara langsung. Hal ini menjelaskan bawah pelaksanaan program Posbindu PTM di Desa Makkawing masih belum berjalan dengan baik. Sehingga dapat diketahui bahwa permasalahan yang terjadi dalam implementasi kebijakan program Posbindu PTM ini belum efektif.

2. Identifikasi Masalah

Berlandaskan latar belakang masalah

Julianawati, E1011171068

Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP Untan

yang telah di kemukan diatas, maka identifikasi masalah dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kurangnya informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang program Posbindu PTM.
2. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam program Posbindu PTM yang dilakukan 1 bulan sekali.
3. Belum membuat target peserta Posbindu PTM yang harus di capai setiap tahunnya.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pendahuluan serta dengan melihat indentifikasi masalah serta melihat focus masalah, maka dari itu peneliti menetapkan rumusan masalah penelitian ini yaitu “Bagaimana proses Implementasi Kebijakan Program Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular Di Desa Makkawing ?

4. Tujuan Penelitian

Peneliti memiliki tujuan penelitian yang akan dicapai, yaitu berdasarkan rumusan masalah yang ada, ada pun tujuan penelitian ialah untuk menganalisis proses Implementasi kebijakan Program Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular Di Desa Makkawing Kecamatan Balai Kabupaten Sanggau

5. Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis yang di harapkan

dalam penelitian ini ialah untuk media aplikasi teori kebijakan publik yang peneliti peroleh dari mata kuliah implementasi kebijakan publik yang berguna dalam pengembangan pengetahuan dan pelengkap ilmu administrasi publik yang dimana fokus dalam kebijakan public bidang sosial. Manfaat praktis, bagi penulis untuk penerapan ilmu yang telah dipelajari di dalam kelas mau pun di luar kelas, bagi pemerintah semoga penelitian ini bisa digunakan untuk menjadi bahan acuan untuk membuat suatu program yang berkaitan dengan Kesehatan masyarakat, serta untuk pembaca semoga penelitian ini dapat berguna untuk bahan informasi tambahan.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah apa pun yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Pendapat senada dikemukakan oleh Edward III dan Sharkansky (dalam Widodo 2018:12) yang mengemukakan bahwa Kebijakan publik adalah apa yang pemerintah katakan dan dilakukan atau tidak dilakukan. Kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah. Pengertian kebijakan ini menurut Kartasmita (dalam Widodo 2018:12)

upaya untuk memahami dan mengartikan, (1) apa yang dilakukan (atau tidak dilakukan) oleh pemerintah mengenai suatu masalah, (2) apa yang menyebabkan atau yang mempengaruhi, dan (3) apa pengaruh dan dampak dari kebijakan tersebut.

Federick (dalam Taufiqurokhman 20014:2) mendefinisikan kebijakan

sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Kemudian Anderson (dalam Mustari 2015;3) mengatakan secara umum istilah “kebijakan” atau “*policy*” dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pengertian

kebijakan seperti ini dapat digunakan dan relatif memadai untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan bisa, namun jadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik. Oleh karena itu diperlukan batasan atau Kebijakan publik dibuat bukannya tanpa maksud dan tujuan, maksud dan tujuan kebijakan publik adalah untuk memecahkan masalah publik yang tumbuh kembang di masyarakat. Masalah tersebut begitu banyak macam, variasi, dan idensitasnya. Oleh karena itu tidak semua masalah publik tadi bisa melahirkan suatu kebijakan publik. Hanya masalah publik yang dapat mengerakan orang banyak untuk ikut memikirkan dan mencari solusi yang bisa menghasilkan sebuah kebijakan

2. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan adalah tahap pertama hal ini penting dalam proses kebijakan publik. Sebuah rencana kebijakan harus dilaksanakan untuk Mencapai efek atau tujuan yang diinginkan apapun produk dari kebijakan tersebut, pada akhirnya bermuara pada bagaimana menerapkan kebijakan. Keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan tergantung pada banyak faktor. Masing-

masing faktor ini saling terkait. Untuk per kaya pemahaman tentang berbagai faktor yang terlibat implementasi, dan kemudian beberapa teori implementasi dijelaskan di bagian ini Kebijakan dan dijadikan sebagai dasar penelitian ini. Perbedaan dalam aspek ini tentu saja tidak Saling meniadakan, Tapi sebaliknya, perbedaan ini untuk Saling melengkapi kekurangan yang ada Setiap model implementasi kebijakan menyediakan.

Kemudian menurut Mulyadi (dalam Deddy 2015:26), “implementasi suatu kebijakan pada dasarnya adalah suatu perubahan atau transformasi yang bersifat multiorganisasi, dimana perubahan yang diterapkan melalui strategi implementasi kebijakan ini mengaitkan berbagai lapisan masyarakat”. Menurut Anderson (dalam Tahir, 2014:56), menyatakan bahwa dalam mengimplementasikan suatu kebijakan ada empat aspek yang harus diperhatikan, yaitu: 1). Siapa yang dilibatkan dalam implementasi, 2). Hakikat proses administrasi, 3). Kepatuhan atas suatu kebijakan, dan 4). Efek atau dampak dari implementasi.

Bertolak dari uraian diatas, maka implementasi diartikan sebagai upaya melakukan, mencapai, memenuhi dan menghasilkan. Dalam berbagai praktek, terlihat bahwa suatu keputusan telah ditetapkan, tidak selalu dilaksanakan

dengan tertip dan rapi, seandainya suatu rencana keputusan yang terdiri dari seperangkat tujuan/sasaran, sarana, dan waktu yang dipilih dan ditetapkan dalam implementasinya, banyak terjadi bahwa keputusan hampir selalu harus disesuaikan lagi dan juga implementasi merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang telah dipilih dan ditetapkan untuk menjadi kenyataan. Pengornisian tujuan-tujuan tersebut melalui peraturan perundang-undangan, merupakan bagian yang terpenting dan tidak dapat dipisahkan dengan lingkungannya dalam proses pengambilan keputusannya.

3. Model-Model Kebijakan Publik menurut O. Jones

O. Jones (dalam Tahir 2011:122) mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoprasikan sebuah program dengan memperhatikan tiga aktivitas utama kegiatan. Menurut Jones ketiga aktivitas tersebut terdapat mempengaruhi kebijakan implementasi kebijakan tiga aativitas yang di maksud ialah :

1. Organisasi

Organisasi yang merupakan pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk

menunjang agar kebijakan dapat memberikan hasil atau dampak. Aktivitas pengorganisasian (*Organization*), merupakan suatu upaya penetapan dan menata kembali sumber daya, unit-unit dan metode-metode yang mengarah pada upaya mewujudkan atau merealisasikan kebijakan menjadi hasil sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran dalam kebijakan. Organisasi dalam hubungan pelaksanaan kebijakan dapat dikaitkan penentu unit-unit kerja yang ada, pembagian tugas dari masing-masing unit organisasi berupa sumber daya manusia, keuangan, dan sarana dan prasarana dalam organisasi.

2. Interpretasi

Menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. Aktivitas interpretasi (*Interpretation*) merupakan aktivitas penjelasan substansi dan suatu kebijakan dalam bahasa yang operasional dan mudah dipahami, sehingga substansi kebijakan dapat dilaksanakan dan diterima oleh pelaku dan sasaran kebijakan. Disamping itu pemahaman masyarakat tidak terletak pada isi kebijakan tetapi juga cara pendekatan dan penyampaian serta cara melaksanakan suatu kebijakan. Interpretasi dalam kaitan dengan keberhasilan implementasi kebijakan mengangkut pemahaman

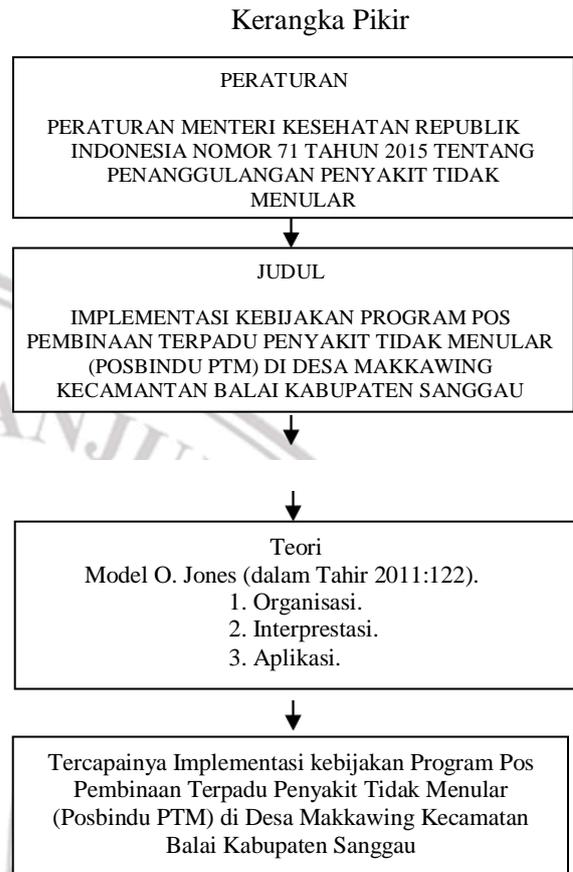
mendalam tentang tujuan dan sasaran kebijakan sehingga dapat memberikan dukungan dengan melaksanakan tugas yang diberikan berhubungan.

3. Aplikasi

Keberhasilan implementasi berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dari pendekatan prosedur, yang berupa langkah-langkah yang ditempuh dalam pelaksanaan kebijakan. Sesuai dengan prosedur tersebut, maka yang terpenting dalam implementasi adalah berdasarkan urutan pentingnya maupun prioritas menurut waktunya. Bertolak dari pemikiran tentang aplikasi atau penerapan program, maka aplikasi tersebut sangat erat kaitannya dengan prosedur dan tata kerja kebijakan yang biasanya berupa petunjuk kebijakan.

Penelitian ini, peneliti menggunakan teori O. Jones. Melihat dan mempertimbangkan masalah yang terdapat dalam penelitian ini, teori yang cocok untuk digunakan dalam permasalahan ini ialah teori O. Jones. Teori yang dikemukakan oleh Jones ini mengarah kepada pelaksanaan kebijakan program ini.

4. Alur Pikir Penelitian



Sumber: Olahan Peneliti, febuari 2021

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan Kualitatif. Pendekatan kualitatif menurut Meleong (dalam Sugiyono 2011:6) bahwa: "penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek

penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Jenis penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang sedang berlangsung. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dan tujuan tertentu. Sehingga pada penelitian ini peneliti akan mendeskripsikan hal-hal yang terjadi yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara sistematis dan akurat mengenai kondisi proses pelaksanaan implementasi Kebijakan program Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM) Di Desa Makkawing Kecamatan Balai Kabupaten Sanggau.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Alat Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman observasi, pedoman wawancara, serta alat

dokumentasi. Pada penelitian ini teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Selain itu, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data serta penarikan kesimpulan.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan proses pelaksanaan implementasi program Posbindu PTM di Desa Makkawing Kecamatan Balai Kabupaten Sanggau, berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang didasari pada telah teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh O.Jones dengan tiga aktivitas utama sebagai berikut:

a. Organisasi

Keberhasilan implementasi kebijakan menurut O. Jones (dalam Tahir 2011:122) harus ada organisasi atau lembaga yang melaksanakannya, mengatakan organisasi adalah “kegiatan yang bertalian dengan pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjadikan program berjalan” bagi Jones organisasi birokrasi berkaitan dengan, pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjadi program berjalan.

Sumber-sumber daya lain yang perlu

diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial dan waktu. Ini karena mau tidak-mau ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka akan timbul masalah untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa jika dilihat dari Organisasi dalam proses pelaksanaan Program Posbindu PTM ini masih ditemukan beberapa kendala seperti yang kita lihat bahwa anggaran yang tidak ada dari pihak puskesmas hanya pihak menggunakan dana Desa saja, sarana dan prasarana yang kurang seperti alat-alat untuk mengecek penyakit tidak menular. Tetapi dalam hal ini juga dari sisi pelaksana sudah cukup baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

b. Interpretasi

Menurut teori O. Jones, yang dimaksud dengan interpretasi adalah menafsirkan bahasa kebijakan menjadi rencana dan pengarahannya yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. Aktivitas interpretasi (*interpretation*) merupakan aktivitas penjelasan substansi dan suatu kebijakan dalam bahasa yang operasional dan mudah dipahami, sehingga substansi kebijakan dapat dilaksanakan dan

diterima oleh pelaku dan sasaran kebijakan.

Pemahaman masyarakat tidak terletak pada isi kebijakan tetapi juga cara pendekatan dan penyampaian serta cara melaksanakan suatu kebijakan.

Interpretasi dalam kaitannya dengan keberhasilan implementasi kebijakan menyangkut pemahaman mendalam tentang tujuan dan sasaran kebijakan sehingga dapat memberikan dukungan dengan melaksanakan tugas yang diberikan berhubungan dengan kebijakan tersebut. Sehubungan dengan interpretasi maka yang ingin dilihat apakah proses pelaksanaan implementasi Kebijakan Posbindu PTM di Desa Makkawing kecamatan balai kabupaten Sanggau sudah berjalan dengan efektif dimana adanya pemahaman yang sama antar pelaksana dan penerima terhadap perannya masing-masing, terkait hal itu proses penyampaian informasi, sosialisasi, kejelasan tugas merupakan hal yang penting dan hal itu dilakukan melalui komunikasi yang baik disamping itu terkait juga dengan konsisten pelaksana. Berdasarkan dari wawancara yang dilakukan peneliti terhadap narasumber mengenai interpretasi dalam proses pelaksanaan implementasi kebijakan program posbindu PTM di Desa Makkawing, proses

penyampaian informasi melalui orang ke orang belum berjalan dengan baik atau belum optimal.

Dapat disimpulkan bahwa kegiatan pelatihan kepada para kader oleh pihak poskesmas untuk meningkatkan pemahaman para kader sudah cukup baik dilihat dari pemahaman para kader memberikan pelayanan kepada masyarakat, namun ada permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan sosialisasi program Posbindu PTM kepada masyarakat. Idealnya keterlibatan komponen masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan program Posbindu PTM ini merupakan awal yang baik karena mengingat juga program ini diperuntukkan untuk masyarakat, memberikan pemahaman kepada elemen masyarakat akan program Posbindu PTM ini hal itu dapat diwujudkan dengan adanya penyampaian informasi yang baik dari para kader atau pelaksana, namun dalam kenyataannya dilapangan masih banyak masyarakat yang belum tau atau belum memahami hakekat dari program Posbindu PTM ini karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan sehingga masyarakat kurang berpartisipasi dalam kegiatan posbindu PTM ini yang dilaksanakan satu bulan sekali ini.

c. Aplikasi

Menurut teori O. Jones mengatakan aplikasi merupakan ketentuan yang bersifat tetap dalam pelayanan untuk mencapai sasaran program. Aplikasi atau penerapan seringkali merupakan proses dinamis dimana para pelaksana ataupun para petugas diarahkan oleh pedoman program maupun patokan-patokan, ataupun secara khusus diarahkan oleh kondisi yang aktual.

Sebuah kebijakan akan sukses atau berhasil jika dapat diaplikasikan atau diterapkan, jika tidak dapat diterapkan hanya merupakan tumpukan kertas saja. Melalui aplikasi ini diharapkan akan muncul respons dari kelompok sasaran program ini. Dengan aplikasi kebijakan program ini akan diketahui apakah lingkungan menerima atau menolak implementasi dan hasil kebijakan yang dibuat pemerintah tersebut, karena itu mengaplikasikan kebijakan bukanlah hal yang mudah, bahkan bisa menimbulkan tantangan yang harus dihadapi implementor, adapun aktivitas aplikasi merupakan aktivitas penyediaan pelayanan secara rutin sesuai dengan tujuan dan sarana kebijakan yang ada. Bertolak dari pemikiran tentang aplikasi atau penerapan program, maka aplikasi tersebut sangat erat kaitannya dengan prosedur dan tata kerja kebijakan yang biasanya berupa

petunjuk pelaksanaannya.

Sesuai dengan pedoman pelaksanaan Posbindu PTM di Desa Makkawing kecamatan balai Kabupaten Sanggau, kegiatan program Posbindu PTM ini meliputi tahapan layanan 5 meja yaitu, registrasi pemberian nomor urut dan pencatatan ulang hasil pengisian KMS ke buku pencatatan/register oleh petugas pelaksana Posbindu PTM; Wawancara untuk menelusuri informasi faktor risiko perilaku dan riwayat PTM pada keluarga dan sasaran kegiatan; Pengukuran (tinggi badan, berat badan dan lingkar perut); Pemeriksaan faktor risiko PTM (tekanan darah, gula darah, kolesterol total, trigliserida, pemeriksaan APE, CBE, IVA dan lain sebagainya disesuaikan dengan kemampuan Posbindu PTM) dan Identifikasi faktor risiko PTM, konseling/edukasi dan tindak lanjut lainnya (misal: rujuk ke Puskesmas).

Mengetahui apakah dengan adanya pedoman atau petunjuk tentang pelaksanaan kegiatan posbindu PTM ini sudah diaplikasikan dengan baik, maka dari itu peneliti melakukan wawancara lebih mendalam lagi mengenai Aplikasi dalam proses pelaksanaan implementasi kebijakan program posbindu PTM kepada kepala Desa Makkawing. Mengenai aplikasi dalam proses Pelaksanaan kegiatan

Posbindu PTM di Desa Makkawing sudah cukup baik, hal ini dilihat bahwa pereapan yang dilakukan oleh para kader Posbindu PTM ini sudah sesuai dengan pedoman yang di anjurkan oleh pihak puskesmas dan juga para kader memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat yang hadir dalam kegiatan Posbindu PTM ini, tetapi memang masih ada sedikit kendala mengingat masyarakat yang kurang dalam partisipasinya, mengingat para kader tidak memiliki target yang harus dicapai berapa orang yang harus datang ini membuat tidak ada tindakan yang dilakukan untuk membuat masyarakat berpartisipasi penuh terhadap program Posbindu ini

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Organisasi

Pada Organisasi dapat dilihat dari Program Posbindu PTM ini sumber daya manusianya sudah cukup baik, anggaran yang ada masih kurang karena menggunakan dana desa, dalam implementasi kebijakan program Posbindu PTM jumlah kader Posbindu ada 5 orang kader dengan berbagai latar belakang Pendidikan yang berbeda dan sumber daya

anggaran yang ada dalam implementasi program Posbindu PTM ini masih kurang, serta sumber daya sarana dan prasarana masih ada beberapa yang masih kurang. Maka dari itu dalam hal sumber daya dalam pelaksanaan Posbindu PTM ini masih kurang baik.

2. Interpretasi

Interpretasi terhadap pedoman pelaksanaan program Posbindu PTM ini belum optimal disebabkan keterbatasan dana untuk menunjang kegiatan ini karena dana yang ada ini tidak dari pihak puskesmas tetapi dari anggaran desa jadi pelaksanaan kegiatan ini masih kurang dengan alat-alat untuk mengecek kesehatan, namun pemahaman dari para kader sudah cukup baik tetapi pemahaman para masyarakat yang menjadi penerima pelayanan Posbindu PTM ini kurang jelasnya karena minimnya sosialisasi bagi masyarakat akan tujuan dan sasaran program ini menyebabkan kurangnya kontribusi atau partisipasi masyarakat dalam kegiatan Posbindu PTM ini yang dilakukan sebulan sekali.

3. Aplikasi

Aplikasi program Posbindu PTM menunjukkan pada aktivitas penyediaan pelayanan secara rutin, sesuai dengan tujuan dan sarana kebijakan yang ada

sudah cukup baik para kader sudah melakukan pelayanan sesuai dengan pedoman pelaksanaannya, dan juga pelayanannya sudah lima meja yang terdiri dari satu orang penjaga tetap jadi sudah tau tugas dan fungsinya masing-masing, namun masyarakat yang datang dalam kegiatan ini masih kurang mengingat para kader tidak menentukan target jadi pelayanan yang diberikan hanya melayani masyarakat yang datang dan itu sedikit sekali dari masyarakat yang ada di Desa Makkawing.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini yang telah diuraikan di atas peneliti dapat memberikan saran. Saran yang diberikan kiranya sedikit banyak dapat memberikan manfaat untuk pertimbangan dalam mengatasi permasalahan yang ada dalam penelitian ini, saran yang dapat diberikan oleh peneliti terkait dengan implementasi kebijakan Program Posbindu PTM di Desa Makkawing, proses implementasi kebijakan ini belum berjalan dengan baik,

1. Organisasi.

Berkaitan dengan sumber daya yaitu manusia serta sumber daya lainnya serta unit-unit atau struktur organisasi, perlu ditambahkan lagi sumber daya anggaran untuk menunjang kegiatan posbindu PTM

ini. Untuk struktur organisasi sudah baik.

2. Interpretasi

Pemahaman para kader dan penerima kebijakan program ini harus sesuai agar kegiatan ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka dari itu perlu sosialisasi yang formal untuk memberi informasi dan pemahaman kepada masyarakat agar masyarakat paham dan mau ikut berpartisipasi dalam kegiatan posbindu PTM ini.

3. Aplikasi

Penerapan dalam program Posbindu PTM ini cukup baik karena sudah sesuai dengan Pedoman pelaksanaan program Posbindu PTM dan dan juga masyarakat menerima kegiatan ini namun belum banyak yang berpartisipasi, ini perlu untuk dilakukan pendekatan lagi kepada masyarakat agar mau ikut berpartisipasi. an yang diberikan adalah

F. DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-dasar kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta
- Hamdi, Muchlis 2014, *Kebijakan Publik, (Proses, Analisis Dan Partispasi)*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Kadir, Abdul. 2020. *Fenomena Kebijakan Publikdalam Perspektif Administrasipublik Di Indonesia*.

Medan. Cv. Dharma Persada Dharmasraya

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. (2012). *Petunjuk Teknis Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM)*.

Moleong, L.J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Mulyadi, Deddy, 2015, *Study Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik*, Bandung : Alfabeta.

Mustari, Nuryanti. 2015. *Pemahaman Kebijakan Publik, Formulasi Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta. PT Leutika Nouvalitera.

Situmorang, Chazali H. 2016. *Kebijakan Publik (Teori Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan)*. Depok : Social Security Development Institute.

Subarsono. 2013. *Analisis Kebijakan Publik konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif , dan R&D*. Bandung. ALFABETA.

Tahir, Arifin 2014, *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung : Alvabeta

Taufiqurakhman. 2014. *Kebijakan Publik, Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Jakarta. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers).

Widago, wahyu. 2019. Kenali resiko penyakit tidak menular (PTM) dan penganliannya. Jakarta.

Widodo, Joko. 2018. *Analisi Kebijakan Publik, Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang. Media Nusa Creative.

Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik (teori, proses, dan studi kasus), Yogyakarta: Caps.

Sumber Perundangan-Undangan :

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menul

Jurnal:

Naditya,. 2013. *Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6. <https://media.neliti.com/media/publications/75362-ID-implementasi-peraturan-daerah-kota-malan.pdf> diakses 5 juli 2021, waktu 19:23.

Pratama, Rezki, Teddy. 2015. *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Tentang Kewajiban Pemerintah Daerah Dalam Memberi Pelayanan Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu)*. Journal Pemerintahan Integratif, Volume 3, Nomor 1. [http://ejournal.pin.or.id/site/wp-content/uploads/2015/04/eJournal%20Teddy%20Rezki%20Pratama%20\(04-21-15-03-43-22\).pdf](http://ejournal.pin.or.id/site/wp-content/uploads/2015/04/eJournal%20Teddy%20Rezki%20Pratama%20(04-21-15-03-43-22).pdf) . diakses 5 juli 2021. Waktu 18:27.